

BEBERAPA CATATAN UNTUK PEMBANGUNAN UMKM KE DEPAN

Oleh:
Noer Soetrisno*

Perekonomian Indonesia yang pernah tumbuh pesat dan mengesankan dunia pada saat sebelum datangnya krisis ekonomi mulai akhir 1997 yang lalu. Kini setelah lebih dari satu dasawarsa dan melewati empat Pemerintahan masa reformasi yang berbeda keadaanya, secara makro telah kembali berada pada keadaan sebelum krisis, bahkan lebih baik. Selain inflasi dan nilai tukar yang relative stabil ekonomi juga terus tumbuh dengan pencapaian PDB per kapita yang telah melampaui posisi tahun 1997. Sebut saja PDB per kapita kini telah mencapai US 1600.- meskipun penduduk kita telah melampaui 230 juta jiwa. Kecukupan pangan (beras) dari produksi dalam negeri telah menjadikan indicator makro lainnya yang dibanggakan dan menjadikan kita merasa lebih baik. Meskipun di sisi lain tekanan kemiskinan dan mundurnya peran kegiatan ekonomi rakyat banyak semakin dirasakan di banyak tempat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan kegiatan yang memberikan penghidupan sekitar 94 persen tenaga kerja di tanah air, di luar Pemerintah dan Usaha Besar, seharusnya menduduki tempat penting dalam wajah ekonomi yang telah kembali tumbuh setelah diterpa krisis tersebut. Kenyataanya kini UMKM hanya menikmati bagian 53% dari PDB dan berbagai himpitan persaingan yang ketat menerpa mereka disertai lilitan kemiskinan yang menekan kehidupan masyarakat pedesaan kita. Mengapa hal ini bias terjadi di tengah pencapaian indicator makro ternyata secara structural tidak menguntungkan semua pelaku? Di sinilah kita perlu memberikan catatan bahwa selama lima tahun ini pembangunan UMKM hanya berhasil menambah jumlah UMKM yang skalanya semakin gurem, tetapi gagal menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dibanding rata-rata perekonomian nasional sebagaimana telah dicanangkan.

Ada fakta yang menarik, bahwa kita sudah berhasil mentransformasi perekonomian kita menurut sector kegiatan ekonomi dari pertanian ke industri dan jasa sebagaimana ditunjukkan oleh peran pertanian yang semakin mengecil, tetapi kita tidak berhasil mengadakan transformasi pelaku yang serasi dengan perubahan sector kegiatan. Unit usaha pertanian terus bertambah terus, sementara unit industry, baik rumah tangga (cottage industry), kecil dan menengah maupun besar tidak tumbuh seimbang dengan perkembangan jumlah penduduk.

Di dalam forum-forum UKM internasional telah diketemukan kesepakatan tentang suatu *benchmark* perbandingan antara jumlah penduduk dan unit usaha industry pengolahan maupun usaha non pertanian yang menjadi indicator kesiapan suatu perekonomian menghadapi keterbukaan. Tingkat kesulitan suatu Negara menyesuaikan dengan keterbukaan biasanya berhubungan dengan indicator tersebut. Suatu perekonomian biasanya tidak memiliki masalah berarti dalam menyesuaikan diri dengan keterbukaan hubungan perdagangan dan investasi kalau rasio antara penduduk dengan Industri Kecil Menengah (IKM) atau SME nya berada di sekitar angka 20. Posisi Indonesia pada tahun 2008 menunjukkan bahwa rasio antara jumlah penduduk dengan IKM itu berada di angka 71. Negara-negara atau perekonomian yang tergolong maju seperti Jepang, Korea Selatan, Singapore dan Taiwan sudah mencapai rasio ideal tersebut, sementara Malaysia dan Thailand sudah berada di angka sekitar 60.

Karena UMKM di Negara berkembang biasanya juga mencakup jasa-jasa, kita juga perlu menengok rasio jumlah penduduk dengan jumlah unit usaha non-pertanian di mana pada tahun 2008 masih menunjukkan angka di atas 6 yaitu mendekati 7. Padahal indicator antara ini dinilai yang paling mudah dijangkau ini seharusnya harus menunjukkan angka yang berada di bawah 6. Dengan demikian beban kegiatan produktif kita menjadi semakin berat. Berbeda dengan indicator rasio penduduk dan IKM, rasio ini lebih ditujukan untuk menakar proses transisi menuju ke perekonomian berbasis industry dari usaha pertanian yang umumnya masih tidak komersial secara penuh. Di samping itu jasa-jasa dinilai sebagai bagian dari melengkapi usaha pertanian

yang masih mengakar. Mengapa usaha mikro kita yang bergerak di luar pertanian tidak tumbuh dengan memadai? Apakah dukungan kebijakan tidak memadai?

Di lihat dari banyaknya Program dan Anggaran yang mendukungnya sebenarnya sudah cukup banyak yang dilahirkan, termasuk saluran kredit baru untuk usaha rakyat. Hal yang menarik adalah fakta bahwa perbankan kelebihan likuiditas yang tidak berhasil dikucurkan kepada proyek-proyek yang layak dan aman, terutama UMKM. Di sector Pemerintah tidak semua anggaran untuk pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat berhasil diserap dengan baik dalam setiap tahunnya. Bahkan dana-dana kemitraan perusahaan besarpun masih harus bekerja keras untuk menyalurkannya. Di bidang pendanaan masalah sumber dan mekanisme penyalurannya sudah demikian banyak ragamnya dan sering membingungkan karena tumpang tindih, tetapi toh tidak membuat transformasi structural pelaku bisnis tumbuh secara sehat akibat daya serap program dan modalitas dukungan yang terabaikan.

Dilihat dari gambaran posisi diatas proses pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis ternyata masih menyisakan persoalan yang banyak bagi UMKM, karena mereka tidak bersama-sama ikut tumbuh sebagaimana ditunjukkan oleh pangsa mereka dalam nilai tambah dan ekspor yang mengecil, sementara itu jumlah tenaga kerja yang harus ditampung terus bertambah. Kebijakan dan ragam penyediaan dana juga telah dikembangkan, tetapi pencapaian sasaran perbaikan produktivitas dan penumbuhan mereka tidak sebanding dengan tantangan yang dihadapi. Di sisi pelayanan Pemerintah untuk memajukan UMKM terasa ada usaha yang terhenti, terutama yang menyangkut pelayanan perizinan dan infrastruktur bagi UMKM, baik fisik maupun maya sangat sedikit. Inilah barangkali letak kesalahan kita memilih factor strategis dalam kebijakan pengembangan UMKM.

Untuk itu ada empat catatan penting yang perlu diperhatikan untuk menyusun kebijakan agar dapat mendorong perkembangan UMKM yang sehat dan efektif yaitu:

Pertama, kebijakan penyederhanaan perizinan dengan pelayanan satu pintu di tingkat daerah disertai dengan dukungan industri jasa perusahaan di kota/kabupaten yang

selama ini tersendat. Penumbuhan industry jasa perusahaan untuk diarahkan mengembangkan kapasitas serap dunia usaha mikro dan kecil terhadap berbagai dukungan agar tercapai kesesuaian antara mekanisme penyaluran (*delivery mechanism*) dengan mekanisme penggapaian (*acquiriring mechanism*);

Kedua. Untuk pemberdayaan usaha mikro agar pemerintah tidak perlu menyusun berbagai macam program yang tumpang tindih tetapi gunakan mekanisme kerja melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM), baik Bank maupun bukan Bank (Koperasi dan lembaga lainnya), dengan legalitas Nasional maupun Lokal dan kembangkan kerjasama serta dukungan program sektoral bagi tenaga lapangan LKM yang berhubungan langsung kepada masyarakat kecuali keahlian teknis yang khusus;

Ketiga, arahkan kebijakan penumbuhan usaha baru yang luas sesuai dengan kebutuhan nasional, daerah dan kota untuk membuat kemampuan daya serap terhadap dukungan financial dan non financial dari komunitas UMKM semakin besar. Prioritas utam adalah sector Industri Pengolahan dan Usaha Kreatif yang sangat strategis untuk menghela kemajuan di pedesaan; dan

Keempat, sudah saatnya memperkuat kembali usaha menengah dalam berbagai bentuk Badan Usaha Berbadan Hukum (Perseroan maupun Koperasi) untuk menghela formalisasi bisnis di semua lini menuju pada peningkatan daya saing usaha mikro dan kecil.

** Penulis adalah Ketua Yayasan Agro Ekonomika berkedudukan di Jakarta.*